



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Jalan Mayjend Sungkono Nomor 7, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis  
Kota Surabaya, Jawa Timur 60225. [www.pta-surabaya.go.id](http://www.pta-surabaya.go.id), [ptasurabaya@gmail.com](mailto:ptasurabaya@gmail.com)

---

Nomor : 1426/KPTA.W13-A/OT1.6/III/2025 19 Maret 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu lembar  
Hal : Penyampaian Petunjuk Pembangunan Zona  
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi  
(WBK) di lingkungan Peradilan Agama Tahun 2025

Yth. Ketua Pengadilan Agama Se-Jawa Timur  
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas yang berkesinambungan pada satuan kerja Pengadilan Agama sewilayah Jawa Timur, maka disampaikan kepada seluruh satuan kerja agar melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melaksanakan dan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023;
2. Melaksanakan dan mempedomani Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 292/SEK/OT.01.1/II/2025 Tanggal 18 Februari 2025 Perihal Langkah-Langkah Strategis Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2025 serta hal-hal serta petunjuk teknis yang tertuang dalam ketentuan peraturan perundangan terkait pembangunan zona integritas di atas;
3. Memerintahkan kepada Tim Pembangunan Zona Integritas satuan kerja untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 dengan langkah-langkah sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 692/DJA/OT1.6/III/2025 tentang Penyampaian

Petunjuk Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Peradilan Agama Tahun 2025 dengan langkah-langkah:

- a. Mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan Lampiran Data Dukung melalui aplikasi PMPZI Mahkamah Agung  
(link: <https://pmpzi.mahkamahagung.go.id>) paling lambat tanggal 27 Maret 2025.
- b. Menyiapkan Video Profil Unit Kerja berdurasi 10 s.d. 15 menit, dengan konten berisikan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM mulai dari proses perencanaan sampai dengan saat ini. Video tersebut diunggah pada website resmi unit kerja dan kanal youtube/media social unit kerja maupun pada media elektronik dan media informasi lainnya.
- c. Melaksanakan pekan survei di setiap satuan kerja untuk memperoleh nilai hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) sebagaimana ketentuan dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023. Pekan survei dimaksud, dilaksanakan tanggal 8 April s.d. 25 April 2025, dan menggunakan aplikasi yang terintegrasi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu link survei: : <https://survei.badilag.net/> dimana link survei dimaksud dapat disampaikan kepada responden untuk diisi.
- d. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada pekan survei Tahun 2025 satuan kerja akan menjadi salah satu pertimbangan kelayakan satuan kerja dimaksud untuk dapat/tidaknya diusulkan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA**

Jalan Mayjend Sungkono Nomor 7, Dukuh Pakis, Kecamatan Dukuh Pakis  
Kota Surabaya, Jawa Timur 60225. [www.pta-surabaya.go.id](http://www.pta-surabaya.go.id), [ptasurabaya@gmail.com](mailto:ptasurabaya@gmail.com)

---

- e. Selanjutnya, kami menegaskan kembali, bahwa pelaksanaan survei pelayanan dimaksud, harus dilakukan secara berkala(bulanan, triwulan, semesterandan tahunan) sebagai landasan pengambilan kebijakan perbaikan terus-menerus satuan kerja masing-masing dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat serta dipublikasikan melalui website pengadilan maupun media publikasi lainnya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Tembusan Yth.

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI